



# **Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan**

*Good Corporate Governance*

**Tahun 2010**

Head Office : Jl Abdul Muis No. 40. Jakarta 10160

Telp 3859050 Fax 3859041

## Laporan Pelaksanaan Tentang *Good Corporate Governance* ( GCG )

Pelaksanaan GCG di Bank Ina Perdana berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, dimana pelaksanaannya berlandaskan pada lima prinsip dasar, sebagai berikut :

- Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
- Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
- Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
- Independensi (*independency*), yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun;
- Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman pelaksanaan GCG telah dituangkan dalam kebijakan manajemen yang mengikat dan harus dijalankan, yang didalamnya mencakup kebijakan tentang Tata Tertib Dewan Komisaris dan Direksi, pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat Dewan Komisaris dan Direksi.

### A. Struktur Tata Kelola Perusahaan

#### Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT. Bank Ina Perdana berjumlah 3 (tiga) orang, dengan komposisi sebagai berikut :

- Natalia Salim : Komisaris Utama
- Birawa Natapradja : Komisaris Utama\*
- Hari Sugiharto : Komisaris Independen
- Denny Susilo : Komisaris Independen

*\* menggantikan Natalia Salim, efektif per 4 November 2010*

Komposisi dan keanggotaan Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan GCG yakni :

- Komisaris Independen berjumlah lebih dari 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris secara keseluruhan.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang dipersyaratkan.
- Anggota Dewan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi untuk bertindak tidak independen yakni :
  - Tidak memiliki saham Bank.
  - Tidak terafiliasi dengan pihak yang memberikan jasanya kepada Bank.

- Bukan merupakan Debitur Inti dan/atau Deposan Inti Bank.

Dalam tahun 2010 telah diadakan 12 (dua belas) kali rapat, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1	Natalia Salim	Komisaris Utama	11	1	90
2	Birawa Natapradja	Komisaris Utama	6	0	100
3	Hari Sugiharto	Komisaris Independen	12	0	100
4	Denny Susilo	Komisaris Independen	11	1	90

Dewan Komisaris telah membentuk Komite-Komite untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris, yakni :

#### 1. Komite Audit

Komite ini berfungsi melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :

- Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern
- Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku
- Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
- Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia.

Keanggotaan Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Denny Susilo (Komisaris Independen)

Anggota : Dr. Timotius (Pihak Independen)

Nia Budhyanti (Pihak Independen)

Pengangkatan anggota Komite Audit dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua anggota Komite Audit memiliki kompetensi, integritas, akhlak, dan moral yang

baik, yang dapat menunjang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Audit.

Dalam tahun 2010 telah diadakan 6 (enam) kali rapat yang seluruhnya dihadiri oleh anggota Komite secara fisik :

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah Rapat</b>	<b>Tidak Hadir</b>	<b>% Hadir</b>
Denny Susilo	Ketua	6	0	100
Dr. Timotius	Anggota	6	0	100
Nia Budhyanti	Anggota	6	0	100

Namun demikian, masih perlu dilakukan perbaikan pada proses pencatatan risalah rapat komite, dimana belum sepenuhnya mencatat seluruh keputusan dan atau rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat. Secara umum, dari notulen rapat terkesan hanya membahas hal-hal yang bersifat administratif, sedangkan dalam kenyataannya banyak arahan dari komite terkait mengenai kinerja Audit dan pembahasan hasil audit, diberikan secara lisan, dimana hal tersebut seharusnya tertuang secara tertib dan lengkap dalam risalah rapat.

## **2. Komite Pemantau Risiko**

Komite ini berfungsi melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang, dan keanggotaannya telah memenuhi ketentuan GCG. Susunan dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

Ketua : Hari Sugiharto (Komisaris Independen)

Anggota : Dr. Timotius (Pihak Independen)

Nia Budhyanti (Pihak Independen)

Tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko dalam membantu Dewan Komisaris telah terlaksana dengan cukup baik dan masih perlu peningkatan, yakni :

- Komite secara berkala mengevaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan di lapangan;
- Komite membantu dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- Komite telah menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko;
- Komite telah mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
- Komite telah mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Dalam tahun 2010, Komite Pemantau Risiko telah 6 (enam) kali melaksanakan rapat, yang seluruhnya dihadiri anggota komite secara penuh ;

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah Rapat</b>	<b>Tidak Hadir</b>	<b>% Hadir</b>
Hari Sugiharto	Ketua	6	0	100
Dr. Timotius	Anggota	6	0	100
Nia Budhyanti	Anggota	6	0	100

Namun demikian, masih perlu dilakukan perbaikan pada proses pencatatan risalah rapat komite, dimana belum sepenuhnya mencatat seluruh keputusan dan atau rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat. Pencatatan hasil rapat secara tertib dan lengkap dalam risalah rapat, sangat diperlukan dalam rangka evaluasi tindak lanjut hasil rapat dan penyediaan bukti tertulis atas seluruh keputusan yang diambil Komite.

### **3. Komite Remunerasi dan Nominasi.**

Komite ini berfungsi melakukan evaluasi kebijakan remunerasi untuk seluruh tingkatan dalam organisasi serta menyusun dan merekomendasikan sistem prosedur pemilihan dan atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang dan keanggotaannya telah memenuhi ketentuan GCG, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Natalia Salim (Komisaris Utama)  
 Anggota : Denny Susilo (Komisaris Independen)  
 Wenijati (Kepala Unit Kerja SDM)

*\*) menggantikan Natalia Salim sejak tanggal 4 November 2010*

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Manajemen telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun masih perlu peningkatan yakni sebagai berikut :

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Menyusun dan memberikan rekomendasi sistem dan prosedur mengenai pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham,
- Memberikan rekomendasi mengenai calon Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham,
- Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan/atau Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

Komite telah melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali dalam tahun 2010, yang dihadiri oleh semua anggota komite secara penuh ;

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah Rapat</b>	<b>Tidak Hadir</b>
Natalia Salim	Ketua	2	0
Denny Susilo	Anggota	2	0
Wenijati	Anggota	2	0

### **Dewan Direksi**

Dewan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang, dengan komposisi sebagai berikut :

- Direktur Utama : Ir. Adi Wiratama, MBA
- Direktur Kepatuhan : Budiarto Santoso
- Direktur : Winadewi Hanantha

Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Independensi Direktur Utama ditunjukkan dengan tidak adanya hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank. Pengangkatan Direksi dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan atas rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Tata tertib kerja Direksi telah ditetapkan dalam Kebijakan Manajemen, yang didalamnya diatur juga tentang tata cara pengambilan keputusan Direksi, yang mengikat dan menjadi tanggungjawab seluruh Direksi.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan GCG yaitu sebagai berikut :

- Bertanggung-jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, antara lain adalah :
  - Tindaklanjut temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
  - Pembentukan Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan. Selain itu, Direksi juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi.
  - Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

Untuk membantu tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan GCG telah dibentuk Satuan Kerja dan Komite sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Audit Internal

Satuan Kerja Audit Internal berfungsi untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan melalui pemeriksaan atas setiap pencatatan yang dilakukan oleh unit-satuan kerja lain.

Satuan Kerja Internal Audit juga memeriksa pelaksanaan GCG di seluruh Unit Kerja dan melaporkannya ke Direktur Utama.

2. Satuan Kerja Manajemen Risiko,  
Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank.
3. Komite Manajemen Risiko  
Komite ini berfungsi untuk membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko agar sesuai dengan *risk appetite* dan strategi manajemen risiko Bank.
4. Satuan Kerja Kepatuhan.  
Satuan kerja ini berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat-rapat yang dilakukan Dewan Direksi telah memenuhi persyaratan tentang frekwensi rapat dan jumlah kehadiran pada setiap rapat. Sepanjang tahun 2010 telah diadakan 15 (lima belas) kali rapat, dimana seluruhnya dihadiri secara penuh oleh semua anggota Dewan Direksi dan dilaksanakan dengan kehadiran langsung.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1	Adi Wiratama	Direktur Utama	15	0	100
2	Budiarto Santoso	Direktur Kepatuhan	15	0	100
3	Winadewi Hanantha	Direktur Kredit	13	2	85

## B. Aspek Transparansi dalam pelaksanaan GCG

Aspek transparansi sebagai salah satu prinsip pokok dalam pelaksanaan GCG, diuraikan sebagai berikut :

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2010, disajikan dalam tabel berikut :

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (%)			
		Bank Ina	Bank Lain	LKBB *)	Perusahaan
Natalia Salim	Komisaris Utama	0%	0%	0%	0%
Birawa Natapradja	Komisaris Utama	0%	0%	0%	0%
Hari Sugiarto	Komisaris Independen	0%	0%	0%	0%
Denny Susilo	Komisaris Independen	0%	0%	0%	0%
Adi Wiratama	Direktur Utama	0%	0%	0%	0%
Budiarto Santoso	Direktur Kepatuhan	0%	0%	0%	0%
Winadewi H	Direktur Kredit	0%	0%	0%	0%

L  
LKBB = Lembaga Keuangan Bukan Bank

## 2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan tidak memiliki hubungan keuangan dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

## 3. Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2010, disajikan sebagai berikut :

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	orang	Jutaan Rp	orang	Jutaan Rp
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4	997	3	2.029
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)	-	-	-	-
Total	4	997	3	2.029

\* Diterima secara tunai

## 4. Share Option

Dalam tahun 2010, tidak ada opsi saham (*share option*) bagi Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank.



Keterangan /Nama		Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
			yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lebar saham)		
Komisaris	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Direksi	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Pejabat Eksekutif	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Total		0	0	0	N.A	N.A

### 5. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 31,37 x
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1,2 x
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1,47 x
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 1,67 x

### 6. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Sepanjang tahun 2010 terdapat 3 (tiga) penyimpangan internal (*internal fraud*) yang berpotensi merugikan Bank, baik kerugian finansial maupun kerugian non finansial. Seluruh *fraud* yang terjadi telah diselesaikan oleh Bank dengan kerugian material yang tidak signifikan. Selengkapnya disajikan sebagai berikut :

Internal <i>Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelum nya	Tahun berjalan	Tahun sebelum nya	Tahun berjalan	Tahun sebelum nya	Tahun berjalan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	2	1	0
Telah diselesaikan	0	0	0	2	1	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0

## 7. Permasalahan Hukum

Dalam tahun 2010, hanya terdapat satu permasalahan hukum perdata, berupa tagihan dari PPA yang belum jelas status penyelesaiannya. Selain hal tersebut, tidak ada permasalahan hukum yang signifikan yang terjadi atau belum terselesaikan di tahun 2010.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	1	0
Total	1	0

## 8. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank, tidak memiliki hubungan dan atau perangkapan jabatan yang tidak diperbolehkan dalam praktik GCG yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, baik hubungan antara anggota, dengan Pemegang Saham Pengendali maupun dengan Bank. Sepanjang tahun 2010, tidak terdapat transaksi yang melibatkan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemegang Saham Pengendali yang mengandung potensi benturan kepentingan, kecuali pemberian kredit kepada pihak terkait atau penempatan dana dari pihak terkait. Pemberian suku bunga kredit dan suku bunga simpanan kepada pihak terkait, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan tidak terdapat perbedaan perlakuan dengan debitur atau deposan biasa.

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
1	-	-	-	-	Tidak ada

Kebijakan dan prosedur penanganan benturan kepentingan sedang disusun oleh Bank dan direncanakan dapat diberlakukan secara efektif pada Semester I tahun 2011.

#### 9. *Buy Back Shares* dan *Buy Back Obligasi Bank*

Sepanjang tahun 2010 tidak terdapat *buy back* saham dan atau obligasi oleh Bank.

#### 10. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang tahun 2010 tidak pernah terjadi pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi Desember 2010 secara total disajikan sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Pihak Terkait	24	162.329
2	Debitur Inti	10	101.838

#### 11. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik

Sebagai tanggung jawab sosial Bank terhadap masyarakat, Bank telah mengadakan beberapa kegiatan sosial sebagai berikut :

- Penanaman pohon di bantaran sungai Banjir Kanal Timur, sebagai upaya untuk melakukan penghijauan di kota Jakarta, dengan biaya sebesar Rp. 19.812.000.-
- Pemberian bantuan air bersih untuk korban letusan Gn. Merapi – Yogyakarta, sebesar Rp. 20.842.000,-
- Selama tahun 2010 tidak terdapat kegiatan politik yang dilakukan Bank.

#### C. Fungsi Audit External

Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Heroe Pramono & Rekan untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Bank tahun 2010. Penunjukan KAP Heroe Pramono & Rekan dilakukan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Peran kunci dari auditor eksternal adalah untuk menjamin bahwa laporan keuangan Bank benar-benar merepresentasikan posisi dan kinerja keuangan Bank yang sebenarnya. Auditor eksternal bertindak mewakili kepentingan *shareholders* untuk mengevaluasi kinerja keuangan

Bank. Laporan hasil audit eksternal juga berperan dalam menjaga transparansi kondisi keuangan kepada publik.

#### **D. Fungsi Audit Intern**

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 dan secara konsisten telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank.

Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat rahasia telah dilaporkan secara rutin ke Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali. Temuan-temuan pemeriksaan Audit Internal telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan ditimbuskan kepada Direktur Kepatuhan, yang selanjutnya wajib ditindaklanjuti. Tindak lanjut atas temuan Audit Internal oleh Direksi merupakan salah satu aspek yang dievaluasi secara berkala oleh Komite Audit Bank.

Sesuai dengan ketentuan GCG, laporan pelaksanaan GCG ini akan disampaikan kepada Pemegang Saham dan kepada Bank Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Pemeringkat di Indonesia, Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), 2 (dua) Lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan, dan 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan.

#### **E. Hasil *Self Assesment* Penerapan GCG di tahun 2010**

Nilai komposit *self assessment* penerapan GCG di tahun 2010 adalah 3,025 (skala 0 – 5) atau berpredikat “**Cukup Baik**”. Hasil *self assessment* penerapan GCG di tahun 2010 disajikan secara ringkas dalam tabel berikut :

**Lampiran 1**

**RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT  
SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE "PT. BANK INA PERDANA"**

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT (a)	PERINGKAT (b)	NILAI (a) x (b)	CATATAN *)
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10.00%	3	0.300	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20.00%	3	0.600	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00%	3	0.300	Komposisi dan kompetensi Komite-Komite cukup sesuai dibanding dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank., serta cukup efektif menjalankan fungsi-fungsinya.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	4	0.400	Kebijakan Tertulis tentang penanganan benturan kepentingan, masih disusun dan belum efektif diimplementasikan
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	3	0.150	Penerapan fungsi kepatuhan cukup efektif dalam menjaga Bank untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku. Kelemahan minor yang dapat segera diperbaiki.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00%	3	0.150	Pelaksanaan fungsi intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam standar minimum SPFAIB. Kelemahan minor yang dapat segera diperbaiki.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00%	3	0.150	Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan.
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50%	3	0.225	Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. Kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diperbaiki
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Debitur Besar (Large Exposures)	7.50%	2	0.150	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan Internal	15.00%	3	0.450	Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> dan media yang mudah diakses dengan cakupan informasi yang cukup lengkap, akurat, dan tepat waktu.
11	Rencana Strategis Bank	5.00%	3	0.150	Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank disusun dengan cukup realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan internal.
<b>Nilai Komposit</b>		<b>100.00%</b>		<b>3.025</b>	<b>CUKUP BAIK</b>

\* : berisikan penjelasan mengapa penilai memberikan peringkat sebagaimana pada kolom (b)